

Buku ini adalah wujud sinergitas dan komitmen dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang banyak diapresiasi baik ditingkat nasional maupun internasional, BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi karir bagi widyaiswara yang didukung oleh Universitas Paramadina sebagai Institusi Perguruan Tinggi. Selanjutnya para Widyaiswara dan dosen berkolaborasi menuliskan kebijakan publik tersebut dalam buku studi kasus dimana OPD dan pemangku kepentingan yang ditulis dalam studi kasus tersebut mereview bersama. Sungguh upaya yang patut diacungkan jempol, agar tacit knowledge tidak hilang bersama manusia-manusianya, namun dapat diabadikan dalam buku yang dibaca lintas generasi dan lintas wilayah.

Dr. H. Teguh Setyabudi, M.Pd. - Kepala BPSDM Kemendagri RI

Sungguh karya yang membanggakan dari teman-teman Widyaiswara BPSDM DKI yg mendapat pemahaman dan pengalaman yg luar biasa ketika berkolaborasi dengan teman2 dosen Universitas Paramadina. Ditengah Pandemi Covid-19 justru para Widyaiswara menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Karya ini bermanfaat untuk masyarakat umum, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat Jakarta, namun juga bagi daerah-daerah lainnya. Saya merekomendasikan buku ini juga dibaca oleh para pemangku kepentingan yang mengelola pemerintahan daerah bukan hanya di DKI Jakarta, juga di tempat lain agar dapat memetik pelajaran berharga dari apa yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI melalui kebijakannya.

Dra. Maria Qibtya, M.Si - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.



Jakarta
Public Policy
Center

universitas
paramadina

Jakarta
kota kolaborasi

STUDI KASUS
KEBIJAKAN PUBLIK DKI

STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DKI

MENCERDASKAN JAKARTA

VOLUME 1



Studi Kasus

- Akses pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di Provinsi DKI Jakarta
- Memberantas Pungli di Sekolah
- Belajar dari Sistem Zonasi
- Kesenjangan Sosial pada Pembelajaran dalam Jaringan
- Penjaminan Mutu SMK di Provinsi DKI Jakarta
- Evaluasi Efektivitas Proyek Perubahan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Pemerintah DKI Jakarta



VOLUME 1 MENCERDASKAN JAKARTA

EDITOR

Prima Naomi | Abdul Malik Gisnar

PENULIS

Sopan Adrianto
Yanto Suharto
Ratna Sari Susanti
Ahmad Khoirul Umam

Budi Sukmajadi
Aep Ermana
Abdul Kholik
Alfikalia

Fariyah Sulasih
Susi Susilawati H
Tarmujianto
Aan Rukmana

Nur Basuki
Helena Sembiring
Ima Rohimah
Fatchiah Kertamuda

Bowo Irianto
Neny Rahmawati
Retno Hendrowati

Djumadiono
Iswan Achmadi
Ahmad Azmy

STUDI KASUS
KEBIJAKAN PUBLIK PROVINSI DKI

VOLUME 1 MENCERDASKAN JAKARTA



Aan Rukmana, Abdul Kholik, Aep Ermana, Ahmad Azmy,
Ahmad Khoirul Umam, Alfikalia, Bowo Irianto, Budi Sukmajadi,
Djumadiono, Farihah Sulasih, Fatchiah Kertamuda, Helena Sembiring,
Ima Rohimah, Iswan Achmadi, Neny Rahmawati, Nur Basuki,
Ratna Sari Susanti, Retno Hendrowati, Sopan Adrianto,
Susilawati Harahap, Tarmujianto, dan Yanto Suharto

STUDI KASUS

KEBIJAKAN PUBLIK PROVINSI DKI

VOLUME 1 MENCERDASKAN JAKARTA

Universitas Paramadina
BPSDM Provinsi DKI Jakarta

2021

**Studi Kasus Kebijakan Publik DKI
Volume 1 Mencerdaskan Jakarta**

©2021 oleh Universitas Paramadina dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Hak cipta dilindungi undang-undang.. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apa pun, baik sebagian maupun keseluruhan tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis : Aan Rukmana, Abdul Kholik, Aep Ermana, Ahmad Azmy, Ahmad Khoirul Umam, Alfikalia, Bowo Irianto, Budi Sukmajadi, Djumadiono, Fariyah Sulasiah, Fatchiah Kertamuda, Helena Sembiring, Ima Rohimah, Iswan Achmadi, Neny Rahmawati, Nur Basuki, Ratna Sari Susanti, Retno Hendrowati, Sopan Adrianto, Susilawati Harahap, Tarmujiyanto, dan Yanto Suharto

Editor : Prima Naomi dan Abdul Malik Gismar

Desainer : Tim Epigraf

Desain kover : Valentino

Sumber Foto kover : Naufal Firza Fauzi

Cetakan I, Januari 2022

ISBN: 978-979-772-077-3

Diterbitkan atas kerja sama antara BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Paramadina.

Kata Pengantar

Rektor Universitas Paramadina

Jakarta telah berkembang menjadi kota yang menjadi contoh bagi kota-kota lain dunia dalam pengelolaan kebijakan publik. Kebijakan ini melibatkan partisipasi publik dan penyediaan ruang publik bagi warganya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perubahan terhadap pengelolaan kebijakan publik dalam beberapa tahun terakhir.

Slogan Kota Kolaborasi yang diperkenalkan oleh Gubernur Anies Baswedan memberikan warna baru terhadap pembangunan Jakarta, dengan melibatkan seluruh *stake holder*, baik warga kota maupun pengelola kota. Dengan demikian, model kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjadikan pembangunan kota menjadi lebih ramah bagi warga dan lingkungan sekitarnya

Kebijakan kolaborasi ini telah merangsang tumbuhnya inisiatif dan kreativitas warga dalam mewarnai setiap proses pembangunan kota. Kebijakan ini telah menjadikan sebagian besar warga kota senantiasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberadaan kotanya. Kolaborasi antar elemen baik warga maupun pengelola kota dapat menciptakan ekosistem pendukung dalam mewujudkan visi dan mimpi bersama untuk Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, setara dengan kota-kota besar lainnya. Jakarta terus melangkah, seolah-olah ingin membuktikan bahwa kebersamaan dengan warga akan bisa menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi.

Kebijakan publik yang tepat merupakan instrumen penting bagi Pemerintahan untuk menata kota yang sejalan dengan visi yang telah ditetapkan bersama. Pola pembangunan kolaborasi dengan melibatkan partisipasi warga, tentunya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan proses pembangunannya. Pelibatan publik dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik telah menumbuhkan kesadaran baru bagi masyarakat akan pentingnya keberadaan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*). Ditambah lagi, keberadaan ruang publik di Jakarta yang semakin luas, diharapkan akan makin meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik setiap warga kota.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan *Jakarta Public Policy Centre* (JPPC) bersama dengan Universitas Paramadina. Kerjasama ini salah satunya dilakukan dalam bentuk penulisan berbagai tema kebijakan publik dalam bentuk studi kasus tentang kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan segala kompleksitas yang dimilikinya telah menjadi laboratorium besar bagi penyusunan kebijakan publik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan tidak hanya bagi Jakarta tetapi juga bagi daerah lain di seluruh Indonesia, bahkan kota-kota besar lainnya.

Buku Studi kasus kebijakan publik ini merupakan hasil kolaborasi yang membanggakan dari berbagai pihak, yakni widyaiswara Pemprov DKI dan para Dosen Universitas Paramadina dari berbagai bidang dan keahlian serta SKPD dan pihak-pihak lainnya. Hingga saat ini diterbitkan tiga volume, yakni: Volume I: Mencerdaskan Jakarta, dan Volume II: Mewujudkan Janji Kesejahteraan, Volume III: Membangun Kota Berkelanjutan. Pengalaman-pengalaman yang berharga dalam buku ini bisa menjadi informasi dan pengetahuan yang sangat

berharga untuk dipelajari, bagaimana sebuah proses kebijakan publik lahir dan dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak BPSDM DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Universitas Paramadina untuk menjadi mitra Kerjasama dan kolaborasi dalam berbagai hal. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada JPPC serta Widyaiswara dalam kolaborasi untuk penulisan studi kasus ini. Kepada seluruh dosen Universitas Paramadina yang kami banggakan, terima kasih atas partisipasi dan keterlibatan saudara dalam penulisan studi kasus kebijakan publik ini. Kami berharap kerja sama baik ini, akan bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Semoga amal kebaikan yang sudah kita lakukan ini mendapat pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Terima Kasih

Jakarta, November 2021

Prof. Dr. Didik J. Rachbini
Rektor Universitas Paramadina



Kata Pengantar

Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta pada konferensi antar-wali kota dan Gubernur Dunia bulan Juni 2020–Forum Cities Against Covid-19 Global Summit 2020 menyatakan bahwa DKI Jakarta mendapat pembelajaran baru dari Pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah dipacu untuk melakukan perubahan secara besar dalam pemulihan perekonomian. Keadaan ini merupakan kesempatan untuk mengubah kota, menjadi Kota Anti Pandemi, Kota Berketahanan terhadap Pandemi, Kota Maju berbasis Digital, Kota yang berkelanjutan dan nyaman dihuni.

Dalam melakukan pemulihan perekonomian, perlu menjalankan Bisnis Pemerintahan yang mempunyai fungsi dan tujuan: 1) meningkatkan taraf hidup warga sambil meningkatkan mutu layanan masyarakat; 2) meningkatkan pemerintahan daerah; dan 3) akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan fungsi dan tujuannya dengan berbagai strategi dan kebijakan pada berbagai sektor. Hal ini tentu dapat menjadi pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga bagi banyak pihak, baik para pengambil kebijakan, akademisi, pihak swasta, maupun lembaga pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik yang lebih dikenal dengan Jakarta Public Policy Center (JPPC) merupakan UPT di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk sebagai upaya terstruktur dan sistematis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola

manajemen pengetahuan (*knowledge management*) terkait kebijakan publik. Pengelolaan manajemen pengetahuan menjadi prioritas untuk memastikan kebijakan publik yang ditetapkan menjadi konsisten, tepat sasaran, dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Hadirnya JPPC menjadi kanal bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengambil pelajaran dari berbagai kota-kota maju di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik di masa mendatang. JPPC juga turut memberikan andil bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan edukasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta sektor privat di seluruh Indonesia mengenai praktik terbaik (*best practice*) kebijakan publik yang diterapkan di Jakarta.

Salah satu tugas utama dari sebuah sistem manajemen pengetahuan adalah memproduksi pengetahuan itu sendiri dan JPCC diharapkan mampu memproduksi publikasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas. Praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan belum banyak dituangkan dalam tulisan dan ini menjadi inovasi untuk menghadirkan tulisan-tulisan yang mampu menjelaskan praktik-praktik secara sistematis, mudah dicerna, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta juga memiliki widyaiswara yang mampu menghasilkan publikasi sebagaimana dimaksud di atas dan berkolaborasi dengan para dosen Universitas Paramadina untuk berusaha menuangkan berbagai topik kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam tulisan berbentuk studi kasus. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan untuk dapat memahami dan mengambil pelajaran untuk pelaksanaan kebijakan serta tata kelola publik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penulis dan editor yang telah meluangkan pemikiran, waktu, dan tenaga untuk menuliskan buku ini hingga tuntas. Tentu bukan hal yang mudah dan banyak tantangan untuk menulis dan berkolaborasi di masa pandemi, bahkan beberapa penulis dan editor sempat harus dirawat atau isolasi mandiri karena terinfeksi Covid-19. Demikian pula, pihak penyelenggara dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta sempat terkendala ketika harus mengadakan panel dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendiskusikan isi tulisan tersebut. Namun, semua ini dapat dilewati dengan baik.

Terima kasih kepada Ibu Dra. Maria Qibtya, M.Si. sebagai Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebelumnya yang telah menginisiasi kegiatan ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mitra kami dari Universitas Paramadina yang dipimpin oleh Dr. Dra. Prima Naomi, M.T., yang telah bersedia berkolaborasi, mulai dari *workshop* penulisan tanggal 7 Desember–23 Desember 2020 hingga terbitnya buku ini. Semua ini tidak akan terwujud tanpa kesungguhan dan kecintaan terhadap pengetahuan dan niat yang tulus untuk berbagi pengetahuan. Buku Studi Kasus terbagi dalam 3 (tiga) buku, yaitu

Volume 1: Mencerdaskan Jakarta

Volume 2: Mewujudkan Janji Kesejahteraan

Volume 3: Membangun Kota Berkelanjutan

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi pembacanya serta menjadi amal jariyah bagi penulisnya.

Salam Jakarta Tangguh, Jakarta Maju, Jakarta Berkeadilan Untuk Semua!

Jakarta, November 2021

Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc.
NIP 197812131997111001



Daftar Isi

Memastikan Akses terhadap Pendidikan Berkualitas Lima Studi Kasus di DKI Jakarta — 1

Akses Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di Provinsi DKI Jakarta (2017–2020) — 7

- A. Pendahuluan — 8
- B. Metodologi — 13
- C. Latar Belakang KJP Plus — 14
- D. Pembahasan — 37
- E. Simpulan dan Saran — 49
- Daftar Acuan — 50

Memberantas Pungli di Sekolah: Studi pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2016–2020 — 52

- A. Latar Belakang — 53
- B. Pungutan Liar di Sekolah — 60
- C. Prinsip-Prinsip dalam Pengendalian Pungli — 63
- D. Pungutan yang Diperbolehkan di Sekolah — 70
- E. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Pemberantasan Pungli di Sekolah — 73
- F. Satgas Saber Pungli sebagai Upaya Pemberantasan Pungli Lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta — 76
- G. Evaluasi Saat ini Mengenai Kebijakan dan Pelaksanaannya — 101
- H. Kesimpulan dan Rekomendasi — 104
- Daftar Acuan — 108

Belajar dari Sistem Zonasi — 111

- A. Selayang Pandang tentang Zonasi — 112
- B. Problematika Zonasi — 117
- C. Solusi Disdik DKI — 126
- D. Siapakah yang Paling Berperan? — 127
- E. Siapakah yang Terdampak? — 134
- F. Dampak Positif dan Negatif bagi Tenaga Pendidik — 134

- G. Dampak Positif dan Negatif bagi Peserta Didik — **136**
- H. Dampak Positif dan Negatif bagi Orang Tua Murid — **138**
- I. Solusi dan Rekomendasi — **141**
- Daftar Acuan — **143**

Kesenjangan Sosial pada Pembelajaran dalam Jaringan: Studi pada Dua Sekolah Dasar di DKI Jakarta — 145

- A. Latar Belakang — **146**
- B. *E-Learning*: Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh — **147**
- C. Pendidikan di DKI Jakarta — **148**
- D. Kesenjangan Sosial dalam Pembelajaran *E-Learning* — **149**
- E. Kesimpulan dan Rekomendasi — **166**
- Daftar Acuan — **167**

Penjaminan Mutu SMK di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Studi pada SMK Negeri 57 Jakarta — 173

- A. Latar Belakang — **174**
- B. Apa itu Penjaminan Mutu? — **179**
- C. Kondisi Ideal SMK dalam Memenuhi Standar Mutu — **181**
- D. Potret Mutu SMK DKI Jakarta — **190**
- E. Tantangan SMK di Era Revolusi Industri 4.0 — **195**
- F. Tantangan SMK di Era Pandemi — **197**
- G. Kekuatan SMK DKI Jakarta sebagai Peluang Menghadapi Tantangan — **201**
- H. Rekomendasi Peningkatan Mutu SMK DKI Jakarta — **212**
- Daftar Acuan — **215**

Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Level IV untuk Menghasilkan Proyek Perubahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta — 217

- A. Pendahuluan — **218**
- B. Teori Pelatihan — **222**
- C. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV — **226**
- D. Pemangku Kepentingan Proyek Perubahan — **231**
- E. Hasil Analisis — **236**
- F. Rekomendasi — **246**
- G. Kesimpulan — **250**
- Daftar Acuan — **252**
- Lampiran Foto Kegiatan — **256**

Memastikan Akses terhadap Pendidikan Berkualitas Lima Studi Kasus di DKI Jakarta

Prima Naomi – Abdul Malik Gismar

Menciptakan kota yang maju dan bahagia warganya, sebagaimana janji Gubernur Anies Baswedan, menuntut pemahaman sistemik atas kehidupan kota. Kota tak ubahnya suatu organisme yang elemen-elemen di dalamnya saling terkait satu dengan yang lain. Selain masing-masing memiliki fungsi spesifik, interaksi antar elemen ini memiliki *emergent function* yang sangat menentukan kinerja keseluruhan sistem.¹ Misalnya saja, Pemprov mungkin saja bekerja optimal memastikan bahwa sungai di Jakarta tidak akan mendangkal dan mampu menampung curah hujan sebarang, namun banjir akan tetap dirasakan oleh warga bila got-got di sekitar lingkungan warga mampet karena kebiasaan buang sampah mereka. Sungai yang sudah disiapkan untuk menampung air limbah menjadi kurang berfungsi karena air tertahan di got dan melimpah ke jalanan sekitar lingkungan. Agar masyarakat tak merasakan banjir, tidak cukup pemrov membersihkan sungai, got, dan gorong-gorong; Perilaku tertib masyarakat dalam membuang sampah pun menentukan hidup tanpa banjir tadi tercapai atau tidak. Saling keterkaitan antar elemen seperti ini berlaku pula dalam persoalan-persoalan yang lain.

Setiap elemen dari sistem yang besar sering kali juga merupakan suatu subsistem yang kompleks. Sistem Pendidikan adalah salah satu subsistem yang kompleks dari sistem tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta yang sangat kompleks. Tantangan besar untuk sistem pendidikan di DKI adalah memastikan akses terhadap pendidikan yang berkualitas kepada seluruh warga kota Jakarta. Sangat penting ditekankan di sini bahwa akses dan kualitas tak bisa dipisahkan; Pemrov punya kewajiban untuk memastikan bahwa

¹ *Emergence function* adalah konsep yang merujuk pada munculnya fungsi-fungsi tertentu yang tidak pernah ada sebelum elemen-elemen dalam sistem berinteraksi. Hanya melalui interaksi antara sejumlah elemen fungsi ini muncul.

layanan pendidikan bagi semua warga kualitasnya sama; tidak boleh ada bias layanan di mana sekolah yang baik hanya bisa diakses oleh mereka yang secara ekonomi mampu saja. Dengan demikian tidak muncul perbedaan kelas di bidang pendidikan yang menutup kemungkinan *upward mobility* bagi kelompok miskin di DKI Jakarta. Semangat pemerintahannya adalah bahwa seorang anak boleh lahir dari keluarga tidak mampu, tapi Pemprov DKI Jakarta akan memastikan bahwa kesempatan anak ini untuk meraih mimpi-mimpinya sama dengan teman-temannya yang lebih beruntung yang lahir dari keluarga mampu. *Upward mobility* dari anak-anak keluarga tak mampu inilah yang dalam jangka Panjang akan mengangkat seluruh seluruh DKI Jakarta ke tingkatan masyarakat yang lebih cerdas dan sejahtera.

Agar sistem pendidikan di DKI mampu mencapai tujuan di atas, keseluruhan sistem harus berfungsi dengan baik. Artinya, elemen-elemen vital dari sistem pendidikan ini—sekolah, komunitas, dinas pendidikan, dan pemerintah secara umum—masing-masing dan secara sinergis menyumbang bagi gerak maju dan keberhasilan keseluruhan sistem ini. Bila hal ini terjadi, maka banyak hal luar biasa dapat dicapai dengan lebih mudah; dan upaya-upaya yang terasa sia-sia (program yang tidak ada dampaknya) akan tergantikan oleh kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit besar. Persoalannya seringkali bukan karena kurangnya usaha, tapi tidak tepatnya usaha yang dilakukan. Kita sering menyentuh tombol yang salah, sehingga tidak ada efeknya. Untuk memastikan bahwa kita mengerti apa saja tombol-tombol atau tuas-tuas yang perlu kita tekan untuk menghasilkan efek tertentu yang kita kehendaki, tidak bisa lain kita perlu tahu persoalan dengan baik, rinci, dan sistemik.

Buku ini merupakan upaya untuk melihat persoalan dengan baik, rinci, dan sistemik tadi, dengan menghadirkan lima studi kasus terkait beberapa elemen penting dalam sistem pendidikan di DKI: implementasi kebijakan KJP, pemberantasan

pungli, kebijakan zonasi, kesenjangan sosial dalam pelaksanaan belajar daring, dan penjaminan mutu SMK. Kelima persoalan dalam studi ini sudah tentu bukan keseluruhan persoalan pendidikan yang ada di DKI Jakarta, namun sebagai inisiatif awal cukup mewakili baik dari sudut tingkat kepentingan maupun kompleksitas persoalannya. Dengan demikian studi-studi ini cukup dapat dijadikan rujukan dan menginspirasi studi-studi lain di bidang yang berbeda.

Studi pertama, oleh Sopan Adriantto, Yanto Suharto, Ratna Sari Susanti, dan Ahmad Khoirul Umam, adalah tentang implementasi KJP Plus (Kartu Jakarta Pintar Plus) di DKI. Mereka secara rinci mendiskripsikan konteks, masukan, proses, dan keluaran dari program ini dan menghubungkannya dengan teori-teori serta konsep-konsep yang relevan untuk memahami realitas. Mereka menunjukkan bahwa dijalankan secara transparan dan akuntabel, program ini punya indikasi memiliki hubungan dengan peningkatan angka partisipasi dan Indeks Pembangunan Manusia; meskipun masih menyisakan persoalan integritas petugas di lapangan yang masih memungkinkan anak orang mampu mendapatkan KJP Plus serta penyalahgunaan dana KJP Plus. Studi-studi ini juga menunjukkan bagaimana kebijakan atau peraturan yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik akan mampu menjawab persoalan.

Studi kedua tentang upaya memberantas pungli di sekolah, dilakukan oleh Budi Sukmajadi, Aep Ermana, Abdul Kholik, Alfikalia. Para penulis memaparkan bagaimana kecenderungan penurunan pungutan liar di DKI Jakarta selama kurun waktu 2016–2019 dapat dihubungkan dengan upaya-upaya sistemik yang dilakukan. Keterlibatan semua elemen penting terkait persoalan pungli, suap, dan gratifikasi ini secara terintegrasi dan sinergik menentukan keberhasilan ini.

Fariah Sulasiah, Suzzy Harahap, Tarmujianto, dan Aan Rukmana melaporkan studi ketiga yang menghadirkan potret

implementasi zonasi di DKI Jakarta, khususnya terkait penerimaan peserta didik. Ada sejumlah masalah dalam gambaran ini, antara lain persoalan teknis pelaksanaan PPDB 2020 di lapangan, berhubungan dengan aturan PPDB itu sendiri, berhubungan dengan pelaksanaan PPDB di saat pandemik, dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan yang masih berkembang di masyarakat serta koordinasi antar instansi-instansi terkait yang belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku tidak berkesinambungan. Studi ini juga mencoba menghadirkan berbagai solusi serta ulasan mengenai dampak positif dan negatif dari kebijakan zonasi terhadap tenaga pendidik, para peserta didik dan orang tua murid.

Studi keempat mencoba menggambarkan kesenjangan pada pembelajaran daring. Mengambil jenjang sekolah dasar sebagai kasus dalam studi ini, Nur Basuki, Helena Ras Ulina Sembiring, Ima Rohimah, dan Fatchiah Kertamuda berhasil menunjukkan adanya berbagai kesenjangan dalam pembelajaran daring ini, khususnya dalam apa yang mereka sebut sebagai kesenjangan gender, kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan psikologis, dan kesenjangan digital.

Studi kelima tentang penjaminan mutu SMK di DKI Jakarta dilakukan oleh Bowo Irianto, Neny Rahmawati, Retno Hendrowati. Secara spesifik studi ini mencoba menggambarkan secara komprehensif upaya satu sekolah yang menjadi kasus dalam studi ini dalam memastikan mutu lulusannya. Ditunjukkan dalam studi ini betapa berbagai berbagai elemen berjalinkelindan menentukan keberhasilan program.

Lima studi yang dilakukan oleh mereka yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari dalam buku ini memiliki nilai tersendiri. Melihat dari jarak sangat dekat, para penulis berhasil memberikan gambaran mengenai realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Melalui insight-insight yang didapat dari realitas sebagaimana

adanya inilah diproyeksikan bagaimana kondisi semestinya atau idealnya. Proyeksi ke depan ini sudah barang tentu parsial dan harus diintegrasikan dengan pertimbangan dari elemen-elemen lain dalam sistem yang tidak termasuk dalam studi ini bila hendak digunakan untuk perumusan kebijakan, namun para penulis sesungguhnya telah berhasil mengaitkan kajian mereka dengan pembuatan kebijakan publik. Para penulis telah mengawali upaya menyediakan *evident* bagi pembuatan kebijakan publik di sektor pendidikan; tentunya harapannya studi-studi ini menjadi langkah awal menjadikan *evident based policy making* bukan lagi sekadar jargon saja, tetapi sebagai hal yang biasa dalam tatakelola pemerintahan, khususnya di DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya.